



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JALALUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT**
3. NHK : **155122**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.262.850.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/108 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, WARISAN Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 375 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/325 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 727.600.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
7. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 26.750.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 53.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 197.000.000**

1. MOBIL, TERIOS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA SM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	272.040.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	132.076.440
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.863.966.440
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.863.966.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.